

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua ed.), Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- L, Dwi Yanny, 2001, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Makaro, Suhasril dan Zakky, Moh, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moeljitno, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, Marcella Elwina, 2020, *Sidang Pengadilan On-Line: Masa Pandemi Covid-19*, dalam Heni Hartono di Rumah Unika: Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika, Semarang: Unika Soegijapranata.
- Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni.
- , 1973, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soerjowinoto, Petrus, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sofyan, Andi, dan Asis, Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wisnubroto, Al, 2002, *Praktek Peradilan Pidana: Proses Persidangan Peradilan Pidana*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega.

INTERNET

- Amin, Rahman, 2020 *Hukum Pembuktian dalam perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish. Diakses pada: https://books.google.co.id/books?id=pvbkDwAAQBAJ&pg=PA94&dq=Hendar+Soetarna&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjfjuaL_YTuAhVWU30KHQwoA_cQ6AEwAXoECAYQAg#v=onepage&q=Hendar%20Soetarna&f=true
- Cahyaningrum, Dian, 2020, "Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19", Info Singkat, Diakses pada: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020-191.pdf

Diakses pada 22 Januari 2021, WWW: <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>.

Promkes Kementerian RI dan Himpunan Dokter Paru Indonesia, 2021, “Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)”, Diakses pada: <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>

Saleh, Abdul Rahman, dan Nasution, Lur., Buyung, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sentralisme Production. Diakses pada: <https://books.google.co.id/books?id=Y1oghffVI2cC&pg=PA97&dq=hukum+waris&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiluvyg58HrAhVTzjgGHXAZCaw4MhDoATADegQIBBAC#v=onepage&q=hukum%20waris&f=true>.

JURNAL

Lumbanraja, Anggita Doramia, 2020, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02 Tahun 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/7896>

Erdianto, Dian, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi melalui Media *Teleconference* di Indonesia." *Jurnal Law Reform*, vol. 11, no. 1, 2015, pp. 65-73. <https://www.neliti.com/publications/163126/kebijakan-hukum-pidana-dalam-pemberian-keterangan-saksi-melalui-media-teleconfer>

Putri, Julya Ergina, 2020, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN SMN)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39626/26057>

M.Erham Amin, 2019, “Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Saksi dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika”, *Badamai Law Jurnal*, Vol.4. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/9236/6520>

Sintha Dewi H.T.P, Thesis, “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*teleconference*) di Persidangan Perkara Pidana”, Jakarta, FH UI, 2012. <https://docplayer.info/48900089-Kajian-yuridis-terhadap-keterangan-saksi-melalui-audio-visual-teleconference-di-persidangan-perkara-pidana-tesis.html>

Kusumo, Stepanus Prabowo. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bayumas dalam perkara polisi pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Skripsi: Fakultas

Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (tidak diterbitkan), 2016.
<http://e-journal.uajy.ac.id/10660/>

Supriyadi W. Eddyono, 2015, "Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP", *Institute for Criminal Justice Reform*.http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2015/08/Pengaturan-Pemberian-keterangan-Saksi-lewat-Videoconference-dalam-R-KUHAP_Final.pdf

UNDANG-UNDANG

Moeljitno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

RI, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
<https://www.bphn.go.id/data/documents/97uu022.pdf>

RI, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

RI, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/uu48-2009.pdf

RI, Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. PB No. M.HM-11.HM.03.02.th.2011, PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. 4 Tahun 2011.
<https://www.lpsk.go.id/upload/Peraturan%20Bersama%20Perlindungan%20Saksi%20Pelaku%20Bekerjasama%20141211%20FIXED.pdf>

RI, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Persidangan secara Elektronik.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4341/peraturan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-perkara-pidana-di-pengadilan-secara-elektronik>

RI, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4065/surat-edaran-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-tugas-selama-masa-pencegahan-penyebaran-corona-virus-disease-2019-covid-19-di-lingkungan-mahkamah-agung-ri-dan-badan-peradilan-yang-berada-di-bawahnya>

RI, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4077/surat-edaran-mahkamah-agung-ri-nomor-2-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-surat-edaran-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-tugas-selama-masa-pencegahan-penyebaran-corona-virus-disease-2019-covid-19-di-lingkungan-mahkamah-ag>

RI, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7345>

RI, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. <https://mahkamahagung.go.id/media/7389>

RI, SEMA No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4131/sema-nomor-5-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-sema-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-tugas-selama-masa-pencegahan-penyebaran-corona-virus-disease-2019-covid-19-di-lingkungan-mahkamah-agung-dan-badan-peradilan-di-bawahnya>

RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam **Tatanan Normal Baru**. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4137/sema-nomor-6-tahun-2020-tentang-sistem-kerja-di-lingkungan-mahkamah-agung-dan-badan-peradilan-di-bawahnya-dalam-tatanan-normal-baru>